



**BUNGA RAMPAI**

# **BUDAYA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL**

Sri Rahayu Pudjiastuti, Herinto Sidik Iriansyah, Ali Idrus, Abdul Haris Fatgehipon,  
Mus Huliselan, Sarbaini, Fatimah, Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfah,  
Desi Sommaliagustina, Silmi Kapatan Inda Robby, Fatimah, Marini,  
Susi Fitria Dewi, Febri Yulika, Maisarah Maulida Hasanah, Pat Kurniati,  
Muh. Subkhan, Efan Setiadi, Diah Turis Kaemirawati, Eka Ari Endrawati,  
Susetya Herawati, Anang Dony Irawan



**BUNGA RAMPAI**

# **BUDAYA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL**

Sri Rahayu Pudjiastuti, Herinto Sidik Iriansyah, Ali Idrus, Abdul Haris Fatgehipon,  
Mus Huliselan, Sarbaini, Fatimah, Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfah,  
Desi Sommaliagustina, Silmi Kapatan Inda Robby, Fatimah, Marini,  
Susi Fitria Dewi, Febri Yulika, Maisarah Maulida Hasanah, Pat Kurniati,  
Muh. Subkhan, Efan Setiadi, Diah Turis Kaemirawati, Eka Ari Endrawati,  
Susetya Herawati, Anang Dony Irawan



**BUNGA RAMPAI**  
**BUDAYA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL**

Penulis:

**Sri Rahayu Pudjiastuti, Herinto Sidik Iriansyah, Ali Idrus, Abdul Haris Fatgehipon,  
Mus Huliselan, Sarbaini, Fatimah, Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfah, Desi Sommaliagustina,  
Silmi Kapatan Inda Robby, Fatimah, Marini, Susi Fitria Dewi, Febri Yulika,  
Maisarah Maulida Hasanah, Pat Kurniati, Muh. Subkhan, Efan Setiadi,  
Diah Turis Kaemirawati, Eka Ari Endrawati, Susetya Herawati, Anang Dony Irawan**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

[www.freepik.com](http://www.freepik.com)

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Sri Rahayu Pudjiastuti**

ISBN:

**978-623-500-245-3**

Cetakan Pertama:

**Juni, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Bunga Rampai Budaya Demokrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Bunga Rampai Budaya Demokrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juni, 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Perolehan Suara Pada Pemilu 2024 Di Kota Depok</b> <i>Sri Rahayu Pudjiastuti &amp; Herinto Sidik Iriansyah .....</i>	<b>1</b>
<b>Dinamika Politik dan Sosial di Jambi: Menuju Pemilihan Presiden Indonesia 2024</b> <i>Ali Idrus .....</i>	<b>25</b>
<b>Peran Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Maluku</b> <i>Abdul Haris Fatgehipon, &amp; Mus Huliselan .....</i>	<b>43</b>
<b>Pilar Demokrasi Dalam Budaya Etnis Banjar Di Kalimantan Selatan</b> <i>Sarbaini &amp; Fatimah .....</i>	<b>57</b>
<b>Harmoni Global: Menyelami Falsafah Nengah Nyapur Masyarakat Lampung Dalam Budaya Demokarsi di Era Global</b> <i>Yayuk Hidayah &amp; Nufikha Ulfah .....</i>	<b>79</b>
<b>Dinamika Demokrasi Dalam Konteks Politik di Sumatera Barat</b> <i>Desi Sommaliagustina .....</i>	<b>91</b>
<b>Harmoni Nilai Karakter Kearifan Lokal Sunda Dalam Membangun Budaya Demokrasi</b> <i>Silmi Kapatan Inda Robby .....</i>	<b>109</b>
<b>Praktik Demokrasi Dalam Budaya Banjar di Kalimantan Selatan</b> <i>Fatimah &amp; Marini .....</i>	<b>127</b>
<b>Adat, Agama dan Demokrasi Dalam Penyelesaian Konflik Perspektif Budaya Minangkabau di Sumatera Barat</b> <i>Susi Fitria Dewi, Febri Yulika, Maisarah Maulida Hasanah .....</i>	<b>145</b>

<b>Kontribusi Kyai Pondok Pesantren Dalam Konteks Pemilu</b> <i>Pat Kurniati</i> .....	167
<b>Keadilan Hambar Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden</b> <i>Muh. Subkhan</i> .....	203
<b>Budaya Demokrasi Dalam Perspektif Kearifan Lokal Sumatera Selatan Pada Pemilu 2024</b> <i>Efan Setiadi</i> .....	219
<b>Peran Mahasiswa Dalam Membangun Budaya Demokrasi di Kampus: Membentuk Pemimpin Masa Depan</b> <i>Diah Turis Kaemirawati S.H.,M.H.</i> .....	231
<b>Peran Demokrasi Guna Mewujudkan Good Governance di Indonesia</b> <i>Eka Ari Endrawati, SH.,MH. &amp; Dr. Susetya Herawati, S.T., M.Si</i> .....	239
<b>Implementasi Demokrasi Dalam Sistem Politik Indonesia</b> <i>Anang Dony Irawan</i> .....	251
<b>GLOSARIUM</b> .....	270
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	274

# IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

---

**Anang Dony Irawan**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur

E-mail: [anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id](mailto:anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id)

## ABSTRAK

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Demokrasi dalam sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi. Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Pengimplementasian Demokrasi dalam Sistem Politik Indonesia di dalam dan di Luar Negeri sangatlah penting untuk dipahami dan bentuk pengimplementasian sifat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah, kita perlu mengetahui dan mendengarkan aspirasi rakyat tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Pada penulisan ini Metode yang digunakan adalah studi Pustaka, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur dari permasalahan yang menjadi topik pembahasan.

**Kata kunci:** Demokrasi; Politik; Negeri; Indonesia.

## ABSTRACT

*Democracy provides an understanding that power comes from the people. With such an understanding, the people will create rules that benefit and protect their rights. Democracy is actually a set of ideas and principles about freedom, but it also includes a set of practices and procedures that have been formed over a long history, so that democracy is often called an*

*institutionalization of freedom. Democracy in a political system is a system that shows that general policy is determined on the basis of a majority by supervised representatives. Foreign policy is one of the fields of study of International Relations. Implementing Democracy in the Indonesian Political System at home and abroad is very important to understand and implement the nature of democracy in everyday life. Especially in dealing with policies or decisions made by the Government, we need to know and listen to the aspirations of the people regarding their rights and obligations. In this writing, the method used is literature study, namely a method of collecting data by understanding and studying theories from various literature regarding the problem that is the topic of discussion.*

**Keywords :** Democracy; Politics; State; Indonesia.

## **A. PENDAHULUAN**

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945 (ARIANA, 2017). Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas dan diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan negara dan masyarakat telah diatur dalam UUD 1945.

Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 maupun batang tubuh UUD 1945. Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi. Dengan demikian, demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pengimplementasian demokrasi dalam sistem politik Indonesia berdasarkan demokrasi Pancasila dimana demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan, substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebiasaan tolong menolong atau gotong royong (Suftyadi, 2021).

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Adlini et al., 2022). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Merdekawati & Restiana, 2023). Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi**

Tentunya kita sudah mengetahui makna dari kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demos* yang artinya rakyat dan *Kratos* yang berarti kekuasaan. Demokrasi menurut Lincoln yaitu bahwa demokrasi merupakan sistem Pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem Pemerintahan yang telah digunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Salah satu negara yang menganut demokrasi yaitu ciri-cirinya adanya kebebasan pers dan media, adanya persamaan hak bagi semua Warga Negara, adanya pemilihan umum langsung serta Pemerintah yang ada ditangan rakyat (Humaira, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua Warga Negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli (Astawa, 2017b) :

- a. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang

memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.

- b. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- c. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap Warga Negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
- d. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk Pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan Pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
- e. Demokrasi menurut International Commission of Juris tadalah bentuk Pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.

Bentuk demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka (Lincoln, n.d.). Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Adapun demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, sehingga bisa diartikan bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia yang berkesinambungan. Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Keuniversalan cita cita

demokrasi dipadukan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sehingga tidak ada dominasi kelompok mayoritas dan minoritas (Pratiwi Tedjo, 2019).

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu tahapan pra kemerdekaan dan tahapan pasca kemerdekaan. Perkembangan Indonesia demokrasi di kemerdekaan pasca mengalami pasang-surut (*fluktuasi*) dari masa kemerdekaan sampai saat ini, selama 78 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan. Inti tatanan kehidupan demokratis secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antar negara atau Pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau Pemerintah dalam posisi keseimbangan (*aquilibrium position*) dan saling melakukan pengawasan (*check and balance*) (Purnamawati, 2020).

## 2. Demokrasi Dalam Sistem Politik

Menurut Hendry B. Mayo (Dwi Sulisworo et al., 2012), menyatakan bahwa demokrasi dalam sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang diselenggarakan dalam suasana terjaminnya prinsip kebebasan politik. Sedangkan menurut Samuel Hutinton (Kurniawan & Sari, 2010), menyatakan bahwa sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dipilih melalui Pemilihan Umum yang LUBER-JURDIL dimana para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Kata politik tidak sama dengan ilmu politik karena seorang ahli ilmu politik belum tentu seorang politikus ataupun tokoh politik. Sistem politik adalah kumpulan elemen atau unsur yang satu sama lainnya saling terkait dalam urusan negara yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Pada masa sekarang demokrasi dipahami pula sebagai sistem politik. Sistem politik dewasa ini dibedakan menjadi dua, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik non demokrasi. Sistem politik (Pemerintahan) demokrasi adalah sistem Pemerintahan dalam suatu Negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (RI, 2020) sistem politik demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Gambaran mengenai sistem politik demokrasi di Indonesia dengan kelembagaan, hubungan antar lembaga prosedur dan prinsip yang dijalankan tertuang dalam dan menurut Pasal-pasal UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami dinamika seiring dengan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Perubahan dan perkembangan sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam konstitusi negara dan juga praktik penyelenggaraan bernegara. Sistem politik demokrasi di Indonesia sekarang ini berdasar pada ketentuan UUD 1945 Amandemen IV. Adapun prinsip dari sistem politik demokrasi, yaitu : (Astawa, 2017a)

- a. Pembagian kekuasaan
- b. Pemerintahan konstitusional
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum
- d. Pemerintahan mayoritas
- e. Pemerintahan dengan diskusi
- f. Pemilihan umum yang bebas
- g. Partai politik lebih dari satu
- h. Manajemen yang terbuka Pers yang bebas
- i. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas
- j. Perlindungan terhadap HAM

### **3. Ciri-ciri Sistem Politik Demokrasi**

- a. Kebijakan Berdasarkan Aspirasi Rakyat  
Dalam sistem demokrasi Warga Negara memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat guna memberi saran dan masukan dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan atau keputusan dalam sistem demokrasi tentu mengindahkan suara mayoritas masyarakat. Hal ini bertujuan agar seluruh kepentingan terakomodir, mencegah terjadinya korupsi dan tidak ada kepentingan pribadi ataupun kelompok.
- b. Pemilihan Umum  
Dalam sistem demokrasi mesti ada pemilihan umum. Selain ajang untuk mencari Pemerintahan baru pemilihan umum merupakan bukti keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat  
Dewan Perwakilan Rakyat merupakan orang-orang yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam pemilihan umum. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat menjadi kepanjangan tangan dari kepentingan rakyat yang memilihnya.
- d. Menjunjung Supremasi Hukum  
Sebagai sistem demokrasi yang memberikan keleluasaan terhadap Warga Negara maka demokrasi harus menjunjung supremasi hukum. Artinya segala bentuk kegiatan masyarakat akan mendapat kebebasan asalkan

tidak melanggar aturan hukum dan hukum menjadi pondasi awal dalam melakukan tindakan sosial.

e. Partai Politik

Dalam sistem demokrasi partai politik merupakan medium untuk meraih kekuasaan. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam politik. Entah ingin menjadi Presiden maupun Wakil Rakyat. Namun prasyarat untuk mencapai itu semua harus melalui partai politik. Partai politik semacam kendaraan untuk menampung aspirasi rakyat sekaligus fungsi kontrol terhadap Pemerintah yang sah.

f. Memiliki Undang-Undang

Undang-undang berarti aturan main dalam Pemerintahan. Kebebasan dalam sistem demokrasi memiliki arti kebebasan terikat karena Warga Negara harus memiliki kebebasan namun dengan tidak mengganggu kebebasan individu lain. Demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan hakikat demokrasi yang seutuhnya. Sejatinnya demokrasi Indonesia masih terkontaminasi oleh politik dominasi yang sewaktu-waktu bisa mengikis semangat berdemokrasi. Adanya peran tangan yang ikut andil dalam deliberalisasi demokrasi di Indonesia juga sukar untuk dibenahi karena sudah terlanjur mengakar bahkan sejak awal era reformasi.

#### **4. Demokrasi Politik Luar Dan Dalam Negeri**

Politik luar negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu Negara Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam peraturan dunia internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pasca reformasi masih menggunakan formula yang sama dengan Pemerintahan-Pemerintahan sebelumnya, namun dalam era ini demokrasi dipandang lebih ditegakkan dari pada sebelumnya. Pemerintah selalu berusaha membuat kebijakan-kebijakan yang harus disesuaikan dengan situasi di dalam maupun di luar negeri dengan selalu berpegang pada prinsip bebas-aktif tanpa meninggalkan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, Pemerintah telah memperjuangkan berbagai kepentingan nasional terhadap dunia Internasional dengan maksud mencapai tujuan Nasional.

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana Pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Politik luar negeri Indonesia secara tegas mengupayakan bahwa secara internasional bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu merdeka secara penuh (Annisa, 2023). Bangsa Indonesia tidak tergantung dengan bangsa lain sehingga tak akan mengubah politik bebas Indonesia. Kebebasan Indonesia yang merupakan penjabaran bahwa Indonesia mampu bebas dari imperialisme dan kolonialisme serta tidak tergantung dan didikte oleh pihak luar.

Demikian halnya politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin seolah-olah terlalu menarik garis ke kiri. Hal ini tercermin dengan diberlakukannya politik "*Nefos-Old-efos*". Pengertian *Nefos* dan *Oldefos* dapat diartikan sebagai politik luar negeri yang anti Liberaisme (anti Barat) (Budiman, 2014). Sesungguhnya dalam UUD 1945, sudah tersurat dan tersirat arah/pedoman bagi politik luar negeri Indonesia, namun dalam pelaksanaannya pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat aturan-aturan lain yang kemudian memberi arah baru terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada saat itu. Hal inilah yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai penyimpangan-penyimpangan politik luar negeri bebas aktif pada masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin muncul setelah terjadinya carut-marut pada bidang Pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal. Demokrasi Terpimpin setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Risdiarto, 2018). Dekrit ini sebenarnya muncul dari gagasan ABRI yang ingin kembali diterapkannya UUD 1945. Harapannya dengan dikeluarkannya dekrit, Pemerintahan Indonesia akan menjadi lebih stabil dan integrasi Indonesia dapat terjaga. Konsepsi mengenai Demokrasi Terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno.

Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah jelas ingin mewujudkan kemerdekaan penuh nasionalnya demi menjalankan revolusinya yang berdasarkan akan sikap yang bebas dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. posisi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin telah mendapat intervensi-intervensi asing terutama mengenai masalah Irian Barat. Salah satu contohnya dalam sengketa Indonesia dan Belanda ada NATO yang letaknya jauh dari Indonesia juga ikut-ikut membicarakan Indonesia soal Irian Barat hanya karena di dalamnya Belanda yang duduk wakil Belanda yang menganggap ada kepentingan terhadap Irian Barat. Pada masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda yang sejak Demokrasi Liberal telah diupayakan diplomasi-diplomasi agar Irian

Barat menjadi wilayah Indonesia seutuhnya dan demi menghapuskan total imperialisme dan kolonialisme di Indonesia (INDONESIA, 2019). Diplomasi yang tak membuahkan hasil yang berarti bagi Indonesia hingga hubungan diplomasi Indonesia dan Belanda mencapai puncak ketegangannya.

Hubungan dan Diplomasi yang dilaksanakan politik luar negeri Indonesia itu, pada masa demokrasi terpimpin seolah terikat akan keharusan tercapainya revolusi sebagaimana digembar-gemborkan Soekarno, sehingga sebagai cara selalu ditempuhnya, walaupun semuanya akibat negatif bagi pergaulan Indonesia di dunia Internasional. Seperti ditegaskan dalam manipol bahwa Cara yang harus dilakukan tidak lain harus “Tidak Mengenal Kompromi” harus “Radikal” dan revolusioner (Aman, 2015). Cara itu tidak bisa digolongkan sebagai suatu cara hanya bertujuan untuk menjalankan ofensif diplomatik saja, karena dalam kenyataan telah menunjukkan sifat-sifat yang radikal, yang menjurus kepada *hostile attitude* terhadap hampir setiap permasalahan, sebagai konsekuensinya maka posisi Indonesia lambat laun semakin terasing (Budiman, 2014).

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri. Fungsi politik dalam negeri: (LOEBIS, n.d.)

- Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri.
- Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis politik dalam negeri.
- Penyelenggaraan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Provinsi.
- Penyelenggaraan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Provinsi.
- Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah Provinsi.
- Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN

- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

## **5. Sejarah Demokrasi Politik yang Ada Di Indonesia**

Demokrasi di dunia memiliki sejarahnya sendiri dimulai dari pertengahan abad 5 SM, istilah Demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara-kota Yunani, terutama di Athena (Putri, 2020). Di Indonesia sendiri sudah di mulai pada 1945 dimana pertama Kali dilakukan demokrasi yaitu demokrasi parlementer. Sejak saat itu demokrasi mulai dijalankan dan Masyarakat sekitar dijadikan sebagai penentu roda demokrasi di Indonesia ini. Demokrasi di Indonesia sendiri sudah beberapa kali mengalami perubahan dan disesuaikan. Banyak Sekali tokoh-tokoh yang memiliki arti demokrasi sendiri-sendiri, dan dapat diketahui bahwa Demokrasi sendiri juga tergantung oleh rakyat itu sendiri yang dapat memilih bebas para pemimpin Untuk memimpin negeri.

Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan lintasan sejarah perjuangan, memiliki konstruksi kenegaraan satu-satunya di dunia yang bangsa terlahir dahulu, kemudian baru membentuk negara. Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno menegaskan, bahwa Negara Kesatuan ialah Negara Kebangsaan. Tujuan Bangsa Indonesia terlahir, merdeka, dan membentuk negara memiliki satu cita-cita, Kehendak Untuk Mengangkat Harkat dan Martabat Hidup Rakyat Indonesia (Kedaulatan Rakyat Indonesia) (Hanafi, 2013). Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem Pemerintahan suatu Negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan Warga Negara) atas negara untuk di jalankan oleh Pemerintahan Negara tersebut. Budaya politik sangat berpengaruh untuk melihat tingkat kehidupan demokratis suatu Negara. Budaya politik merupakan variabel determinan atau berpengaruh terhadap sistem politik. Demokratisasi tidak berjalan baik apabila tidak di tunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Realitas masyarakat ini sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Setelah Indonesia merdeka, terjadi revolusi nasional yang memunculkan ide tentang budaya Nasional. Di era Orde Lama, keberagaman budaya, dalam demokrasi terpimpin, digunakan sebagai alat untuk tujuan revolusi. Sedangkan di era orde baru, budaya-budaya daerah, dalam demokrasi Pancasila, diarahkan untuk mendukung program pembangunan. Serta, keberagaman budaya daerah berusaha untuk diintegrasikan demi menunjang integrasi/persatuan Nasional. Kemudian di era reformasi, dalam iklim demokrasi liberal, individu dan atau komunitas budaya mendapatkan

hak-hak kebudayaan, antara lain hak-hak tradisional, hukum adat serta tanah ulayat (Prasisko, 2019).

## **6. Demokrasi di Indonesia**

Gagasan demokrasi telah berjumpa dan berinteraksi secara dialektik Dengan berbagai ragam konteks sosial, kultural, juga corak, dan tingkatan Perkembangan ekonomi. Praktik berdemokrasi telah berkembang Dan merambah seluruh masyarakat dunia dengan segala corak ragamnya, Termasuk di Indonesia Ide demokrasi ini memang telah menjadi komitmen universal. Dalam pandangan Armartya Sen (Dewi, n.d.), klaim universal yang terkandung dalam demokrasi mencakup nilai-nilai intrinsik, instrumental, dan konstruktif. Nilai intrinsik demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi. Menggunakan kebebasan, menggunakan hak-hak sipil dan politik merupakan bagian dari kehidupan bagi individu sebagai makhluk sosial. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik mengandung nilai intrinsik bagi kehidupan manusia. Sementara itu, nilai dan peran atau fungsi instrumental demokrasi adalah upaya dan kemampuan mendengarkan keinginan rakyat. Apa yang diekspresikan dan didukung untuk memperoleh perhatian politik, termasuk tuntutan memenuhi kebutuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan nilai dan peran atau fungsi konstruktif demokrasi dapat dipahami dan disarikan bahwa praktik berdemokrasi akan memberikan kesempatan kepada Warga Negara untuk saling belajar dan membantu masyarakat secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan dan menimbulkan masalah-masalah baru saat pelaksanaannya di Era Reformasi ini. Contohnya, korupsi pemilu, penerimaan dana ilegal partai politik, dan dana kampanye pemilu serta isu penegakan hukum pemilu (pengaturan dan regulasi pemilu yang tidak sinkron dan tidak terbarukan) (Irawan, 2023).

### **1) Demokrasi Era Revolusi**

Pada era revolusi nasional, apabila memperhatikan praktik-praktik Politik para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan tahun 1945, pada dasarnya Sudah tampak praktik-praktik berdemokrasi di kalangan mereka. Misalnya Dalam BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang bertugas merumuskan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat Negara, Dan lainnya, telah dilakukan perdebatan yang sengit di antara mereka. Keanggotaan dalam BPUPK yang berjumlah 68 orang juga telah mencerminkan perwakilan dari ideologi politik, terutama kalangan Islamis (20%) dan Nasionalis (80%). Perjalanan berdemokrasi berikutnya terlihat pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945, pada saat menetapkan UUD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. UUD yang

ditetapkan adalah UUD yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, tetapi embrionya, baik pembukaan maupun batang tubuhnya, berasal dari pembukaan dan batang tubuh UUD yang telah dirancang jauh sebelumnya, termasuk di dalamnya Piagam Jakarta. Dalam proses menetapkan UUD, terjadilah dialog yang sengit, sehingga Soekarno merasa kewalahan ketika menghadapi Ki Bagus Hadikusumo (Sudrajat, 2015). Akhirnya, melalui pendekatan yang dilakukan Mohammad Hatta, dengan memanfaatkan Teuku Mohammad Hassan, wakil Sumatera dalam PPKI, dalam waktu 15 menit, terjadilah peristiwa pencoretan anak kalimat pengiring sila Ketuhanan, baik dalam pembukaan maupun dalam Pasal 29 ayat (1). Demikian juga dengan kata 'Islam' yang semula dicantumkan dalam Pasal UUD dihapuskan. Dengan cara ini, kompromi yang dilakukan antara golongan Islamis dan Nasionalis, keberatan dari wilayah Timur terhadap UUD telah hilang dan kesatuan tetap terjaga (Mu'arif, 2020).

## **2) Demokrasi Era RIS**

Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar (3 Agustus - 2 November 1949): Republik Indonesia, *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) sebagai perwakilan PBB. RIS dikepalai oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta. Di tengah-tengah bangsa Indonesia menghadapi Agresi Belanda II (19 Desember 1948) dengan pelbagai diplomasi dan pertempuran, kehidupan demokrasi tetap berjalan dan dapat dilaksanakan. Pembentukan negara RIS juga dilaksanakan secara demokratis.

## **3) Demokrasi Liberal**

Berlakunya UUDS 1950 yang menggantikan bentuk Negara Serikat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali sejak tanggal 17 Agustus 1950, pada umumnya dianggap sebagai saat mulai berlakunya sistem Demokrasi Liberal. Sebagai sistem politik yang liberal, UUDS 1950 juga menganut sistem parlementarisme secara konstitusional serta sistem multi-partai seperti yang terjadi pada kurun waktu 1945-1949. Sistem yang menyediakan saluran aspirasi politik melalui partai politik ini ternyata menimbulkan instabilitas nasional, sehingga dalam masa berlakunya UUDS 1950 tercatat tujuh kali jatuh banggunya kabinet (Dewanto, 2021).

## **4) Demokrasi Terpimpin**

Seminggu setelah Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinetnya yang baru, menggantikan Kabinet Juanda yang mengembalikan

mandatnya pada 6 Juli 1959. Kabinet Juanda adalah kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parlementer ke periode Demokrasi Terpimpin. Dalam Kabinet Soekarno ini, Juanda tetap diberi posisi penting, yaitu sebagai Menteri Pertama, yang tugasnya tidak banyak berbeda dengan tugas Perdana Menteri (SETYAWAN, 2017).

#### **5) Demokrasi Pancasila (Orde Baru)**

Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan Yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut Demokrasi Pancasila (Wijaya, 2014). Dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku Sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, tetapi istilah Demokrasi Pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru (1966). Istilah Demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin di bawah Pemerintahan Soekarno.

#### **6) Demokrasi Pada Masa Orde Reformasi**

Menurut Hariyono (Sudrajat, 2015), perkembangan demokrasi di Indonesia Seakan menemukan momentumnya pada Era Reformasi. Setelah jatuhnya Soeharto sebagai Presiden, birokrasi dan militer menjadi sasaran awal untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Penyelenggaraan pemilihan umum tidak Lagi ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, melainkan harus ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen. Euforia demokrasi menyebar ke semua arah, sejak dari pusat sampai ke daerah dan meliputi semua bidang kehidupan. Presiden dan wakil Presiden Yang sebelumnya dipilih oleh MPR dianggap tidak sesuai lagi karena mereka yang duduk pada lembaga itu sering tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh Karena itu, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung Dilakukan oleh rakyat. Demikian juga dengan jabatan politik untuk kepada Daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dipilih langsung oleh rakyat. Militer tidak boleh menduduki jabatan di luar pertahanan, Terutama jabatan politik.

Sistem Pemerintahan yang sentralistik segera diganti dengan Pemerintahan yang desentralisasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang itu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pers diberi kebebasan untuk memberi informasi secara bebas dan terbuka tanpa intervensi dari aparat Pemerintah dan keamanan. Praktik demokrasi pada Era Reformasi tidak serta merta membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyat, bahkan ada yang mengatakan dengan istilah 'demokrasi' telah berubah menjadi '*democracy*' (rakyat yang gila) (li & Presidensial, n.d.).

## **7. Problematika Politik Di dalam dan Di luar Negeri**

Problematika politik luar negeri adalah Politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu terorisme internasional. Terorisme bukan isu baru namun menjadi salah satu isu yang semakin penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Perang global melawan terorisme memperoleh legitimasi dan dukungan yang semakin meluas dari masyarakat internasional terutama setelah terjadi tragedi 11 September 2001 di New York (Windiani, 2017). Keterlibatan Indonesia dalam perang melawan terorisme ini tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai bagian masyarakat internasional untuk secara bersama-sama memerangi terorisme, melainkan juga demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam penanganan isu ini sangat mengedepankan kerja sama dengan negara-negara lain baik bilateral, regional dan multilateral. Namun demikian, kerja sama internasional yang terkait dengan penanganan isu terorisme internasional harus dicermati karena sangat diwarnai oleh perspektif pihak-pihak yang berkepentingan.

Problematika politik dalam negeri yaitu adanya korupsi. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai Lembaga (Setiadi, 2018). Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa dan birokrasi. Terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan: struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain: mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan secara terintegrasi, adanya kerja sama internasional dan regulasi yang harmonis.

## **D. KESIMPULAN**

Dari hasil penulisan artikel ini yang menjelaskan tentang Pengimplementasian Demokrasi dalam Sistem Politik Indonesia didalam dan Luar Negeri dapat disimpulkan bahwa penting bagi kita untuk memahami dan mengimplementasikan sifat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau keputusan yang

ditetapkan oleh Pemerintah. Kita perlu mengetahui dan mendengarkan aspirasi rakyat tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan adanya demokrasi dalam sistem politik luar maupun dalam negeri, maka tidak akan ada kesenjangan dan hak-hak maupun kewajiban Warga Negara, terutama dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, dan kebebasan berekspresi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/download/3394/1177/>
- Aman. (2015). *SEJARAH INDONESIA MASA KEMERDEKAAN: 1945–1998* (1st ed.). Kartika N. Nugrahini. [https://staffnew.uny.ac.id/upload/132303695/penelitian/Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan\\_Dr.Aman, M.Pd.pdf](https://staffnew.uny.ac.id/upload/132303695/penelitian/Sejarah%20Indonesia%20Masa%20Kemerdekaan_Dr.Aman,%20M.Pd.pdf)
- Annisa. (2023). *Politik Luar Negeri Indonesia: Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Landasannya*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/politik-luar-negeri-indonesia/>
- ARIANA, I. N. J. (2017, July 25). PERJALANAN DEMOKRASI DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *FAKULTAS PARIWISATA UNIVERSITAS UDAYANA*, 1–29. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/67816b84f663b23f66a5f48d2bef3254.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/67816b84f663b23f66a5f48d2bef3254.pdf)
- Astawa, I. P. A. (2017a). MATERI KULIAH KEWARGANEGARAAN : DEMOKRASI INDONESIA. *Universitas Udayana*, 1–12. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/5c38de8a798f624eab38b1fe6f7e97ff.pdf)
- Astawa, I. P. A. (2017b). Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia. *Universitas Udayana*, 1–11.
- Budiman, A. (2014). IMPLEMENTASI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1965. *CAKRAWALA*, 5(2), 149–158. [http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/607/B.A.10 Jurnal Cakrawala Galuh Vol 5 No 2 September 2014 ISSN 2086-8111.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/607/B.A.10%20Jurnal%20Cakrawala%20Galuh%20Vol%205%20No%202%20September%202014%20ISSN%202086-8111.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Dewanto, W. (2021). *PENGISIAN JABATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN BERBASIS DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* [Universitas Jayabaya]. [http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/154/1/Disertasi - Dr. Wishnu Dewanto.pdf](http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/154/1/Disertasi%20-%20Dr.%20Wishnu%20Dewanto.pdf)
- Dewi, D. A. T. (n.d.). SISTEM DEMOKRASI YANG PERNAH DITERAPKAN DI INDONESIA. *Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada*, 1–6. <https://osf.io/czx95/download>

- Dwi Sulisworo, T., Wahyuningsih, D., & Arif, B. (2012). *DEMOKRASI*. Universitas Ahmad Dahlan. [https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI dwi.pdf](https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf)
- Hanafi, M. (2013). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 227–246. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2657>
- Humaira, A. (2010). Konsep Negara Demokrasi. *Refleksi*, 3(1), 288.
- Ii, B. A. B., & Presidensial, A. S. (n.d.). *Syafiie, I. K, Pengantar Ilmu Pemerintahan . PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 88 Sarundajang , Babak Baru Sistim Pemerintahan , Kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 33 16 [Universitas Islam Indonesia]*. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19817/05.2 bab 2.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19817/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y)
- INDONESIA, A. K. L. N. R. (2019). *Momen Penting dalam Sejarah Diplomasi Indonesia*. KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang\\_kami/momen-penting-dalamsejarah-diplomasi-indonesia](https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalamsejarah-diplomasi-indonesia);
- Irawan, A. D. (2023). *Potret Historis Demokrasi di Indonesia*. Kawanhukum.Id. <https://kawanhukum.id/potret-historis-demokrasi-di-indonesia/>
- Kurniawan, A., & Sari, N. K. (2010). Demokrasi Untuk Indonesia. *Grup Governance Science*, 1–31. [https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/Ria Talpia Dkk.pdf](https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/Ria%20Talpia%20Dkk.pdf)
- Lincoln, A. (n.d.). *Nama : Antonius Oktavianus Nim : 2111B0038 Email : fianaye20@gmail.com Abstrak*.
- LOEBIS, F. H. (n.d.). *Bidang Politik Dalam Negeri*. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Retrieved May 9, 2024, from <https://kesbangpol.babelprov.go.id/content/bidang-politik-dalam-negeri>
- Merdekawati, I., & Restiana. (2023). Penggunaan Bahasa Pada Iklan Indomie. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa (JURRIBAH)*, 2(1). <https://prin.or.id/index.php/JURRIBAH/article/view/1142/1206>
- Mu'arif. (2020). *Muhammadiyah dan Pancasila: Ki Bagus Hadikusuma dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. [https://ump.ac.id/Berita Muhammadiyah-2049-Muhammadiyah.dan.Pancasila..Ki.Bagus.Hadikusuma.dan.Sila.Ketuhan an.Yang.Maha.Esa.html](https://ump.ac.id/Berita%20Muhammadiyah-2049-Muhammadiyah.dan.Pancasila..Ki.Bagus.Hadikusuma.dan.Sila.Ketuhanan.Yang.Maha.Esa.html)
- Prasisko, Y. G. (2019). DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 3(1), 1–12. <https://waskita.ub.ac.id/index.php/waskita/article/view/64>

- Pratiwi Tedjo. (2019). Perkembangan Demokratisasi dalam Sistem Politik Demokrasi. *Univesitas 17 Agustus Semarang*.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Putri, A. S. (2020). *Demokrasi: Pengertian, Sejarah Singkat dan Jenis*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/21/160000069/demokrasi-pengertian-sejarah-singkat-dan-jenis?page=all>
- RI, S. J. M. (2020). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* (19th ed.). Sekretariat Jenderal MPR RI. [https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf)
- Risdiarto, D. (2018). LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PENGARUHNYA BAGI PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 59–68. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/54/pdf>
- Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(3), 249–262. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/234/pdf>
- SETYAWAN, A. B. (2017). DJUANDA KARTAWIDJAYA: DARI MENTERI HINGGA PERDANA MENTERI 1946-1959. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(2), 273–288. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/18876/17231>
- Sudrajat, A. (2015). DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–17. [https://eprints.uny.ac.id/67948/1/AJAT - DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF SEJARAH.pdf](https://eprints.uny.ac.id/67948/1/AJAT_DEMOKRASI_DALAM_PERSPEKTIF_SEJARAH.pdf)
- Suftyadi, A. R. (2021). *PELAKSANAAN PRAKTIK POLITIK OLIGARKI DALAM PENEKAKAN NEGARA HUKUM DEMOKRASI* [UNIVERSITAS PAKUAN]. <https://lib-pasca.unpak.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=2617&bid=14726>
- Wijaya, Ia. (2014). DEMOKRASI DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM*, 4(April 2014), 136–158. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/52/37/37>

Windiani, R. (2017). PERAN INDONESIA DALAM MEMERANGI TERORISME. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135–152. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/download/16912/13722>

## PROFIL PENULIS



**Dr. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.** Lahir di Bali, 28 Juni 1964, adalah Ketua Program Studi Magister PPKn STKIP Arrahmaniyah Depok. Tahun 1997 telah membidani berdirinya STKIP Arrahmaniyah dan menjadi Ketua dua periode sampai tahun 2005. Tahun 1996 sd 2008 menjadi Ketua Jurusan PPKn di STKIP Kusuma Negara Jakarta. Februari 2008 sd September 2013 menjadi Pembantu Ketua I Bidang akademik. September 2013 sd Desember 2017 menjadi Kepala

LPPM. Disamping itu menjadi dosen tidak tetap di STIAM I Jakarta dan Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada Jakarta. Menjadi Pembina pada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) DKI Jakarta. Menjadi Dewan Pakar AP3Knl DKI Jakarta. Menjadi Pengurus Perkumpulan Masyarakat Peduli Pendidikan (PMPP). Menjadi Sekretaris Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK). Tahun 1989 Menikah dengan Ahmad Juaini Thayalisi, dikaruniai sepasang anak dan 3 cucu laki-laki. Artikel utama yang terbit di scopus "Utilization of Forest Natural Resource Potentials, Especially Wood, to Realize Independence of Regional Development, JARDCS. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems presents peer-reviewed survey and original research articles. Scope of JARDS 2020. Q3. Volume 12 Issue 2 Pages 1720-1724" Integration of Islamic Spirituality, mental health resilience, and educational Success. Community Practitioner, 2024, Q4. 21(3), pp.442-453. Buku yang terbit: (1) Penelitian Pendidikan 2019 : penerbit Media Akademi Yogyakarta, ISBN: 978-602-5584-51-0. Halaman 378. (2) LEBAH: Inspirasi dan Ilustrasi Kehidupan Karakter Lebah Menurut Al-Qur'an Penerbit Gemala Mei 2020. 118 halaman. ISBN: 978-623-7754-13-8. (3) Etika Lingkungan, Penerbit Gemala Juni 2020 . halaman 225. ISBN: 978-623-7754-18-3.



**Prof. Dr. Drs. Ali Idrus, M.Pd., ME.** Ali Idrus adalah seorang dosen di FKIP Universitas Jambi, yang telah berbakti selama 38 tahun lebih dan memilih bidang ilmu dalam disiplin ilmu perilaku, ilmu kognitif, dan pendidikan. Latar belakang akademisnya diantaranya, gelar magister dalam ilmu ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi dan Pendidikan Luar Sekolah di IKIP Bandung serta gelar Doktor dalam



**Anang Dony Irawan, S.H., M.H.** Kelahiran Kota Pahlawan, Surabaya 1984. Tinggal di daerah Barat Kota Pahlawan, Sambikerep. Menyukai hal yang "berbau" sejarah Kota Pahlawan maupun Sejarah Perjuangan Bangsa. Pendidikan Dasar dan Menengah semuanya ditempuh di Kota Pahlawan, termasuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2009 dan Magister Hukum di

Universitas Narotama Surabaya tahun 2013. Pengalaman kerjanya diawali menjadi Pengajar Ekstra Kurikuler di Sekolah Dasar almahatannya, lalu menjadi admin koperasi dan Event Organiser. Setelah itu menjadi seorang karyawan di perusahaan ternama otomotif di Kota Surabaya mulai 2005-2017 sebelum akhirnya menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) di tahun 2018-sekarang. Menjadi Dosen Luar Biasa pada Unit MKDU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Institut 10 Nopember Surabaya (ITS) tahun 2021-2022. Selain itu pernah juga menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif tahun 2019, Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, dan Pengawas TPS pada Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024. Termasuk terlibat aktif dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surabaya. Saat ini penulis diamanahi di kepengurusan Seni Beladiri Indonesia Pimda 06 Surabaya. Juga pada Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga PWM Jatim, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sambikerep, dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sambikerep. Menulis di beberapa artikel media cetak dan media online, maupun yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Ada pula yang disajikan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. e-mail Penulis : [anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id](mailto:anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id).



**Prof. Dr. H. Sarbaini, M.Pd** adalah Guru Besar Pendidikan Nilai dan Karakter Pancasila dan Kewarganegaraan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin. Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 27 Desember 1959. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 (Drs) di Jurusan PMP-KN FKIP Unlam Tahun 1984, gelar M.Pd di Peroleh di IKIP Bandung

**BUNGA RAMPAI**

# **BUDAYA DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL**

Buku yang menggali berbagai aspek demokrasi dari sudut pandang kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Melalui beragam pembahasan yang ditawarkan, pembaca diajak untuk memahami kompleksitas dinamika politik, sosial, dan budaya dalam konteks demokrasi. Dari strategi politik hingga peran agama dalam penyelesaian konflik, buku ini membedah keterkaitan antara budaya lokal dengan pelaksanaan demokrasi di berbagai wilayah. Misalnya, penelusuran terhadap strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemilu Kota Depok membuka wawasan tentang bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi hasil suatu pemilihan. Begitu juga dengan peran tokoh agama dalam menyelesaikan konflik di Maluku, yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat menjadi fondasi bagi perdamaian. Lebih dari sekadar sebuah analisis politik, buku ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun budaya demokrasi yang inklusif. Dari nilai-nilai Sunda hingga falsafah Nengah Nyapur masyarakat Lampung, pembaca diajak untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang dinamika politik, tetapi juga menawarkan inspirasi untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.



Penerbit

**widina**

[www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

ISBN 978-623-500-245-3



9

786235

002453